

PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nur A. Dwi Putri

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik, UMRAH

E-mail: na_dwiputri@yahoo.com

Abstrak

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah merupakan salah satu media yang sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi, penyambung aspirasi masyarakat, serta sebagai sabuk pengaman informasi terutama di daerah perbatasan seperti Provinsi Kepulauan Riau di bandingkan media lainnya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya infrastruktur di daerah perbatasan dan masih belum berdaulatnya wilayah udara Republik Indonesia khususnya untuk wilayah sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu diharapkan pemerintah lebih memperhatikan RRI di wilayah perbatasan. Karena mengingat yang dihadapi RRI di daerah perbatasan bukanlah radio biasa namun Radio-radio asing yang memiliki teknologi yang canggih dan memiliki daya pancar yang luas dan tentunya pemerintah pusat harus terus berusaha untuk mengambil alih wilayah kedaulatan udara Republik Indonesia agar RRI dapat leluasa untuk menjalankan perannya sebagai sabuk pengaman informasi.

Kata kunci: Peran RRI, Perbatasan Kepulauan Riau

Abstract

Public Radio Broadcasting the Republic of Indonesia is one of the media that plays an important role in conveying information, connecting people's aspirations, as well as information safety belts, especially in border areas such as Riau Islands Province in other media. This is due to the lack of infrastructure in the border area and still not sovereign airspace of the republic of Indonesia especially for the region around the Riau Archipelago province. Therefore, the government is expected to pay more attention to RRI in the border areas. Because considering that RRI in the boundary area is not a regular radio but foreign radios that have sophisticated technology and have a broad transmit power and of course the central government should continue to try to take over the territorial sovereignty of Indonesian republic so that RRI can freely to run its role as seat belt information.

Keywords: RRI Roles, Riau Islands Border

Pendahuluan

Negara akan menjadi negara yang maju apabila birokrasi atau aparatur pemerintahnya baik, sebaliknya juga seperti itu negara akan menjadi negara terbelakang apabila aparatur pemerintahnya tidak baik, namun untuk menjalankan pemerintahan yang baik dalam artian yang responsif, partisipatif dan interaktif pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri, seperti dalam konsep *Good Governance* bahwa pemerintah yang baik itu harus melibatkan tiga unsur yaitu masyarakat, pemerintah itu sendiri dan swasta. Terlebih lagi untuk daerah perbatasan yang masuk dalam salah satu isu strategis ketimpangan pembangunan sebuah wilayah (Agusta, 2014 : vi). Di mana wilayah perbatasan adalah daerah rawan separatisme. Selain itu kawasan perbatasan adalah merupakan daerah yang harus dijaga, karena kawasan ini merupakan kawasan terbuka, rawan konflik, penuh ancaman kejahatan, infiltrasi, sabotase intelejen yang tentu terutama berasal dari luar Indonesia.

Oleh karena itu masyarakat, selain sebagai partner pemerintah juga sebagai konsumen pemerintah yang wajib pemerintah layani dan harus berperan aktif sehingga tercipta kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera serta dapat terwujud pelayanan yang responsif. Untuk mewujudkannya maka pemerintah membutuhkan media untuk membantu mensukseskan pelaksanaan dari peran pemerintahan tersebut. Salah satu cara agar masyarakat dan komunitas berperan aktif adalah melalui bantuan media (Eddyono, 2012).

Adapun media yang ada di masyarakat beragam. Untuk di wilayah provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki 19 pulau terdepan di Indonesia memiliki beberapa media yaitu koran, tv, radio dan internet. Namun terdapat fenomena yang menarik dimana masyarakat di daerah perbatasan khususnya Provinsi Kepulauan Riau ini lebih banyak berinteraksi melalui radio dari pada media lainnya. Di mana masyarakat banyak yang menyampaikan keluhannya kepada RRI melalui beberapa program yang sudah disiapkan oleh RRI seperti opini publik, dialog interaktif, dan walikota menyapa yang selalu mendapat rating tertinggi dibandingkan program lainnya. Hal ini menarik bagi peneliti karena peneliti ingin melihat bagaimana kondisi media di daerah perbatasan serta mencari tau mengapa masyarakat lebih memilih RRI bukan media lainnya untuk mereka menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka kepada pemerintah.

Tinjauan Pustaka

• Peran Radio Republik Indonesia (RRI)

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 11 September 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan, bahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketahui secara luas oleh

masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional melalui RRI

Adapun tugas pokok LPP RRI berdasarkan PP 12/2005 tentang lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh NKRI.

Sedangkan berdasarkan pusat data dan informasi RRI (www.rri.co.id) adapun peran RRI adalah sebagai berikut :

1. Peran dalam pemberdayaan masyarakat

RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup,

kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil, dll.

2. Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa

Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh Indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis dan budaya daerah-daerah lainnya.

3. Peran RRI sebagai Pelestari Lingkungan

RRI menyelenggarakan siaran Green Radio untuk penanaman kembali dan *Re Use, Reduce* dan *Recycling* dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.

4. Peran RRI sebagai media pendidikan

RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design, lomba IT, lomba band indie, Bintang Radio, Pekan Tilawatil Quran. Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan sosial masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB, dll.

5. Peran RRI sebagai Media Diplomasi

RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat *reciprocal*. Kerjasama siaran dengan ABC, NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW, dll.

6. Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana

RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui

Radio Based Disaster Management. Setiap ada bencana dalam waktu 24 jam RRI harus melaporkan, kemudian diikuti program pelipur lara korban bencana dan *trauma healing* dengan mendirikan studio darurat.

7. Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar negeri

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi 7 negara yaitu Hongkong, Malaysia, Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman.

8. Peran RRI sebagai media hiburan

RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran musik dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes simfoni Jakarta dan orkes simfoni yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran kesenian dan budaya, lawak,quiz, dll.

9. Peran RRI sebagai sabuk pengaman informasi

Selama tahun 2009-2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau *blankspot*, antara lain : Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampana, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampan. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun di

daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI atau *blankspot*.

• Perbatasan

Konsep Perbatasan dikenal sejak era lahirnya negara-bangsa. Semuanya bermula ketika 24 Oktober 1648, ditandatangani Perjanjian Westphalia, yang menjadi salah satu cikal bakal lahirnya semangat nasionalisme, yang pada akhirnya membentuk negara.

Menurut Riswanto Tirtosudarmo, perbatasan negara atau *state's border* dikenal bersamaan dengan lahirnya negara perbatasan adalah sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antar negara. Dengan demikian, memang perbatasan negara sendiri adalah sebuah kajian baru muncul seiring dengan lahirnya konsep negara itu sendiri.

O.J. Martinez, sebagaimana dikutip Riwanto Tirtosudarmo, mengkategorikan ada 4 tipe perbatasan (Nurmandi, 2012: 36):

1. *Alienated Borderland*: Suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
2. *Coexistent Borderland*: Suatu wilayah perbatasan dimana

konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan.

3. *Interdependent Borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
4. *Integrated Borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Mengacu pada tipologi Martinez di atas, Riwanto Tirtosudarmo mengkategorikan wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia termasuk di antara tipe kedua dan ketiga yaitu *coexistent* dan *interdependent borderland*.

Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data primer bersumber dari hasil wawancara dengan kepala RRI Kota Tanjungpinang, kepala bagian penyiaran RRI Kota Tanjungpinang, dan masyarakat dari setiap kabupaten dan kota sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, internet dan Koran yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pembahasan

Gambaran Umum media di daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2002 tanggal 24 September 2002. Secara *de jure* Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002. Akan tetapi secara *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai tanggal 1 juli 2004. Adapun provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari 2 kota dan 5 kabupaten yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi dan Kota Batam serta 5 kabupaten yaitu terdiri dari kabupaten Bintan, Lingga, Tg. Balai Karimun, Lingga, Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Provinsi Kepulauan Riau adalah provinsi yang kondisi geografisnya terdiri dari kepulauan seluas 425.214,67 km², terdiri dari wilayah daratan seluas 9.982,88 km² dan wilayah lautan seluas 415.231,79 km². Dengan demikian luas laut Provinsi Kepulauan Riau adalah

sekitar 97% laut dan luas daratan sekitar 3% (www.dprd-kepriprov.go.id) dan dipisahkan oleh lautan. Provinsi Kepulauan Riau adalah merupakan provinsi yang berada diperbatasan Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja.

Adapun kondisi media di Provinsi Kepulauan Riau ini peneliti pilah menjadi 6 bagian yang terdiri dari kabupaten dan kota yaitu pertama, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan penulis jadikan satu bagian karena Kota Tanjungpinang dan Bintan berada di satu pulau yang sama yaitu Pulau Bintan, kedua, Kota Batam. Ketiga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Keempat, Kabupaten Lingga,

Kelima Kabupaten Natuna, dan yang terakhir keenam Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pertama, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan berada pada satu pulau yang sama yaitu Pulau Bintan. Sehingga terdapat kesamaan media yang beredar di kedua wilayah ini. Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan serta Kabupaten Bintan yang merupakan daerah pariwisata memiliki akses media yang baik, baik itu untuk koran, televisi, radio maupun internet. Adapun koran, televisi, radio dan internet yang ada di daerah ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Media di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

Koran	Televisi	Radio	Internet
• Tanjungpinang Pos	- TV Tanjungpinang	- BISS 103,20 FM	- www. Batamindependent.com
• Kepri News	- Bintan Vison TV	- Pandawa 103,9 FM	- www.cy-beritabatam.com
• Kepri Pos	- Barelang Vision TV	- Swara Pesona Bintan	- www. Batamgo.com
• Batam Pos	- Rajawali TV	105,3 FM	- www.Beritatanjungpinang.com
• Tribun Batam	- I news TV	- Galaxy 107,3 FM	- www. Isu Kepri.com
• Pos Metro Batam	- Semenanjung TV	- RRI Pro 1 98,3 FM	- karimuntoday.com
• Koran Sindo Batam	- Kepri cyber School	- RRI Pro 2 92,2 FM	- www. Kepridays.com
• Haluan Kepri	TV	- Mercy 88,00 FM	- www.kepripost.com
• Kompas		- Green 97,8 FM	- www. Kepripost.com
		- O Nine 93,0 FM	- www. Kepribangkit.com
			- www.kepriupdate.cm
			- www. Kepritoday.com
			- www. Kepri.info
			- www.kepri tv

-
- www.lenteraindonesia.com
 - www.Linggapos.com
 - www.suarakepri.cm
 - DII
-

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

Kedua, Kota Batam. Kota Batam merupakan kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Apabila kita menggunakan sarana transportasi laut maka jarak tempuh antara Singapura dan Batam hanya lebih kurang 1 jam perjalanan. Selain itu Kota Batam merupakan salah satu kota maju yang ada di Indonesia yang menjadi tujuan investor menanamkan modalnya karena

ketersediaan lahan industri, listrik, tenaga kerja yang terampil serta letaknya yang berada pada jalur perdagangan dunia. Hampir seluruh media dapat diakses dengan mudah di Kota Batam tidak hanya media dalam negeri media luar negeri pun banyak beredar di Kota Batam, seperti yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Media di Kota Batam

Koran	Televisi	Radio	Internet
• Tanjungpinang Pos	- Kepri TV	Siaran Radio dari	- www.Batamindopent.com
• Kepri News	- Tanjungpinang TV	dalam negeri dan	- www.cy-beritabatam.com
• Kepri Pos	- Bintang Vison TV	Siaran Radio Asing	- www.Batamgo.com
• Batam Pos	- Rajawali TV	Bahasa Inggris :	- www.Beritatanjungpinang.com
• Tribun Batam	- I News TV	- BBC World Service	- www.IsuKepri.com
• Pos Metro Batam	- Semenanjung TV	(88,9 MHz)	- karimuntoday.com
• Koran Sindo Batam	- Kepricyber School TV	- Gold (90,5 FM)	- www.Kepridays.com
• Haluan Kepri	(KCS TV)	- Hot (91,3 FM)	- www.kepripost.com
• Kompas		- Kiss (92 FM)	- www.Kepripost.com
• Bintang News		- Symphony (92.4 FM)	- www.Kepribangkit.com
• Koran peduli		- Class (95 FM)	- www.kepriupdate.com
		- Power (98 FM)	- www.Kepritoday.com
		- Lush (99.5 FM)	- www.Kepri.info
		Siaran Radio	- www.lenteraindonesia.com
		Bahasa Mandarin :	- www.Linggapos.com
		• Jia (88,3 FM)	- www.suarakepri.com
		• YES (93.3 FM)	- DII

-
- Capital (95.8 FM)
 - Love (97.2 FM)
 - UFM (100.3 FM)
- Siaran Radio Asing
 bahasa Melayu :
1. Ria (89,7 FM)
 2. Warna (94,2 FM)
- Siaran radio asing
 bahasa Tamil :
- Oli (96,3 FM)
-

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016

Ketiga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Kabupaten Tanjung Balai Karimun adalah kabupaten yang letaknya tidak jauh dari Kota Batam. Untuk media yang masuk ke Kabupaten Tanjung Balai Karimun lebih kurang sama dengan yang ada di Kota Batam. Siaran-siaran asing juga masih terdengar namun berbeda kejernihannya dengan

Kota Batam, hal ini dipengaruhi oleh letak Batam yang lebih dekat dengan negara tetangga dari pada Tg. Balai Karimun. Koran-koran lokal yang masuk ke Tg. Balai Karimun rata-rata adalah koran-koran yang disuplai dari Batam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Media di Kabupaten Tg. Balai Karimun

Koran	Televisi	Radio	Internet
• Batam Pos	• Karimun TV	• Radio Azam FM 103,5 FM	- www. Batamindependent.com
• Koran Komunitas Karimun	• Kepri Cyber School TV	• Radio Canggai Putri FM 105,3 FM	- www.cy-beritabatam.com
• Pos Metro Batam	- Rajawali TV		- www. Batamgo.com
• Haluan Kepri	- Semenanjung TV		- www. Beritatanjungpinang.com
	• Kepricyber School	• Bumi Berazam FM 104,5 FM	- www. Isu Kepri.com
			- karimuntoday.com
			- www. Kepridays.com
			- www. kepripost.com
			- www. Kepripost.com
			- www. Kepribangkit.com
			- www. kepriupdate.com

- www.Keprtoday.com
 - www.Kepri.info
 - www.kepri tv
 - www.lenteraindonesia .com
 - www.Linggapos.com
 - www.suarakepri.com
 dll

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

Keempat, Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten yang minim pembangunan infrastruktur, banyak tower-tower komunikasi yang ada dipulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh lautan tidak berfungsi. Kabupaten yang antar satu desa dengan desa lainnya dipisahkan oleh lautan sehingga kapal adalah merupakan transportasi utama masyarakat kabupaten lingga. Untuk koran hampir semuanya sampai di Lingga namun pada sore hari karena

harus menyesuaikan dengan jadwal feri. Sedangkan untuk internet juga masih minim terkadang ada sinyal terkadang hilang. Radio pun seperti itu banyak masyarakat yang harus menambah ketinggian pemancar dari radio yang dimiliki masyarakat agar dapat mendengar dengan jernih siaran di radio. Sedangkan televisi masyarakat menggunakan parabola untuk bisa menikmati siaran tv. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Media di Kabupaten Lingga

Koran	Televisi	Radio	Internet
• Tanjungpinang Pos	Hampir semua siaran	• Radio Azam FM 103,5 FM	- Minim sinyal
• Kepri News	ditangkap dengan syarat harus memiliki parabola.	• Radio Canggai Putri FM 105,3 FM	
• Kepri Pos		• Bumi Berazam FM 104,5 FM	
• Batam Pos			
• Tribun Batam			
• Pos Metro Batam			
• Koran Sindo Batam			
• Haluan Kepri			
• Kompas			

Sumber: Data Olahan peneliti 2016

Kelima, Kabupaten Natuna. Natuna adalah kabupaten yang berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dahulunya Kabupaten Anambas adalah merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Natuna. Seperti halnya Anambas Natuna juga sebuah kabupaten yang dipisahkan oleh lautan. Bahkan baru-baru ini dijadikan tempat latihan bersama antar negara oleh TNI. Dan juga bahkan RRC sempat mengklaim bahwa Natuna adalah bagian dari Republik Rakyat Cina. Untuk media yang ada di Natuna seperti koran, harus menunggu jadwal kapal atau pesawat yang tidak tiap hari. Adapun perlu diketahui bahwa untuk

media koran hampir semua kabupaten kota di Kepri menunggu suplai dari Batam dan Tanjungpinang. Sehingga jadwal kedatangan koran diikuti dengan ritme kapal yang akan berangkat ke Natuna. Sedangkan internet untuk ibu kota terbilang bagus namun untuk daerah-daerah lainnya khususnya yang terdepan jangkakan sinyal internet, sinyal telekomunikasi saja susah didapatkan. Sedangkan untuk televisi dan radio sudah cukup memadai dengan adanya Natuna TV dan RRI Ranai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Media Kabupaten Natuna

Koran	Televisi	Radio	Internet
• Tanjungpinang Pos	• Natuna TV	• Radio Natuna	- Tergantung sinyal
• Kepri News	• Siaran lainnya	107,2 FM	
• Kepri Pos	harus	• Radio Prada	
• Batam Pos	menggunkan	100,2 FM	
• Tribun Batam	parabola.	• RRI Ranai Natuna	
• Pos Metro Batam		Pro 1 105,9 FM	
• Koran Sindo Batam		• RRI Ranai Natuna	
• Haluan Kepri		Pro 2 99,2 FM	
• Kompas			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

Keenam, Kabupaten Anambas. Anambas adalah salah satu kabupaten yang merupakan kabupaten baru yang dihasilkan dari pemekaran wilayah induknya, yakni Kabupaten Kepulauan Natuna. Berdasarkan UU No.33/2008, Keduanya masih bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Dilihat dari posisi

geografis, Kabupaten Kepulauan Anambas terletak tepat di Jantung Asia Tenggara dan ASEAN. Selain itu Badan Nasional Pembangunan Daerah telah menempatkan ANAMBAS sebagai pusat gravitasi ASEAN dan menyebutnya sebagai jantungnya ASEAN (Poltak 2015 : 81). Namun untuk media di Anambas

sangat minim sekali dapat dilihat pada tabel 4.7, karena sama dengan Kabupaten Natuna diatas semuanya tergantung kelancaran transportasi. Sedangkan untuk Anambas sarana transportasi tersebut sangat minim baik transportasi laut dan udara, terlebih lagi jika musim utara sudah tiba maka banyak kapal tidak berani untuk

berangkat. Sehingga membuat media terhambat untuk sampai di Anambas selain itu minimnya transportasi ini membuat biaya hidup mahal. Untuk media televisi harus menggunakan parabola sedangkan untuk radio hanya ada 1 radio lokal sedangkan RRI belum ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 6. Media di Anambas

Koran	Televisi	Radio	Internet
<ul style="list-style-type: none"> • Tanjungpinang Pos • Kepri News • Kepri Pos • Batam Pos • Tribun Batam • Pos Metro Batam • Koran Sindo Batam • Haluan Kepri • Kompas 	<ul style="list-style-type: none"> • Harus menggunakan parabola untuk mendapatkan siaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Radio Berlian - 102,2 FM 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinyal yang minim.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

Dari Tabel-tabel diatas dapat kita lihat bahwa media yang paling efektif yang bisa menjangkau masyarakat di daerah perbatasan khususnya Kepulauan Riau adalah media radio. Apabila sarana telekomunikasi seperti sinyal internet sudah memadai sebenarnya masyarakat cukup hanya mendengarkan radio dari *handphone* dengan aplikasi RRI *play* yang bisa di *download* dan dimanapun kita berada kita bisa mendengarkan siaran RRI.

Peran RRI sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik memiliki beberapa peran yang salah satunya adalah peran sebagai sabuk pengaman informasi, wujud dari peran tersebut adalah RRI mendirikan stasiun radio di perbatasan dan daerah terpencil diantaranya Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Mainou, Atambua, Ampura, Boven Digoel, Kaimana, Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang.

Menurut Kepala RRI Kota Tanjungpinang yaitu Bapak Khalid adapun tujuan didirikannya Radio Republik Indonesia ini di daerah perbatasan adalah untuk menangkai siaran asing yang bersifat negatif seperti siaran-siaran yang dapat melunturkan rasa cinta terhadap tanah air.

Khalid mengatakan bahwa Radio Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 stasiun penyiaran yaitu pertama RRI Tanjungpinang, RRI Tanjungpinang merupakan RRI yang pertama kali dibangun yaitu pada tanggal 11 september 1955. Selanjutnya diikuti RRI Ranai Natuna dan ketiga RRI Batam yang baru berdiri tahun 2010 yang pada saat dibangun masih dalam bentuk studio produksi namun sekarang statusnya sudah meningkat menjadi stasiun Radio Tipe C.

Adapun Cakupan siaran untuk RRI Tanjungpinang meliputi Tanjungpinang, Bintan dan Lingga. RRI Batam dengan cakupan Batam dan Tanjungbalai Karimun, RRI Natuna dengan cakupan Natuna dan sekitarnya. Dan hanya Kabupaten Anambas yang merupakan satu-satunya kabupaten di provinsi Kepulauan Riau yang belum terjangkau oleh RRI padahal Kabupaten Kepulauan Anambas berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tidak heran, Jaringan TV negara tetangga terutama ASEAN Mudah ditangkap. Namun sebenarnya menurut Khalid (Kepala RRI Tanjungpinang) untuk pendirian RRI di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mendapat anggaran tahun 2015 yang

lalu namun ada beberapa kendala dalam mewujudkannya yaitu berkaitan dengan permasalahan ketersediaan listrik dan yang kedua adalah masalah lahan/tempat cikal bakal akan dibangunnya RRI di kabupaten tersebut. Ke-2 permasalahan tersebut memang selalu menjadi hambatan yang ditemukan di daerah perbatasan seperti juga yang dikatakan Mas'ud Said (2011 :10) bahwa permasalahan kawasan perbatasan adalah sebagai berikut: pertama, pada umumnya daerah perbatasan adalah daerah tertinggal. Kedua, inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ketiga, ketidakjelasan wewenang dan koordinasi. Keempat, kemiskinan kultural dan struktural. Kelima, keterbatasan infrastruktur. Keenam, lemahnya penegakan hukum serta ke tujuh tergerusnya nasionalisme dan rasa kebangsaan.

Selain itu juga permasalahan jaringan telekomunikasi, di Kabupaten Kepulauan Anambas sinyal untuk telepon genggam dan jaringan internet sering mengalami gangguan padahal Anambas wilayahnya dilintasi kabel serat optik telekomunikasi internasional bawah laut, dengan kecepatan dan kapasitas yang sangat besar. Beberapa jaringan kabel serat optik yang terdapat disana, antara lain Tata TGN-Intra Asia (perusahaan kabel telekomunikasi terbesar didunia), *Asia Pasific Gateway* (APG), *Asia-America Gateway* (AAG), *Cable System*, dan *Southeast Asia Japan Cable* (SAJC), dengan panjang kabel antara 6.700-20.000 km. Terdapat lebih dari 40 perusahaan telekomunikasi

internasional, dengan lebih dari 20 jaringan berkapasitas 4-55 TB, telah memasang kabel serat optic melewati perairan Anambas. Ini artinya Anambas siap menyuplai kebutuhan untuk infrastruktur telekomunikasi internasional, atau ia sudah terkoneksi dengan banyak negara dan kota, serta jaringan telekomunikasi mereka di kawasan Asia Pasifik (Poltak 2015: 90).

Namun di tahun 2016 ini pihak RRI akan menjajaknya lagi ujar Khalid agar bagaimana caranya RRI bisa bersiaran di Anambas yang tentunya membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Salah satu yang akan di jajaki RRI di 2016 ini paling tidak di Anambas telah tersedia stasiun *relay* dimana nantinya siaran-siaran yang ada di RRI Tanjungpinang akan di-*relay* di Anambas yang tentunya juga akan berisi informasi-informasi yang didapatkan RRI dari kontributor yang ada di Anambas dengan kerjasama pemerintah daerah setempat. Hal ini penting sekali diwujudkan mengingat Anambas juga merupakan salah satu daerah dengan angka pencurian ikan oleh asing yang cukup tinggi.

Untuk menjalankan peran RRI sebagai sabuk pengaman informasi di Provinsi Kepulauan Riau telah dibangun oleh pusat stasiun Radio tipe C di Kota Batam mengingat Kota Batam merupakan kota yang sangat berdekatan dengan Singapura. RRI Batam setiap harinya akan menyampaikan informasi seputar perbatasan kepada RRI pusat yang nantinya akan disiarkan secara nasional.

Namun untuk RRI Batam ini seharusnya pemerintah harus lebih fokus hal ini disebabkan karena yang dihadapi oleh RRI Batam adalah bukan hanya radio-radio komunitas yang ada di dalam negeri atau Kota Batam itu sendiri tetapi yang dihadapi adalah radio-radio asing yang tentunya memiliki teknologi yang lebih canggih yang memiliki daya pancar siaran yang cukup jauh. Sedangkan RRI Batam hanya memiliki daya pancar 5 kwatt. Terkadang RRI tidak dapat didengar di daerah kita sendiri namun radio asing bisa sampai.

Selain itu permasalahan yang juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat untuk daya pancar ini adalah berkaitan dengan ruang udara. RRI Batam pernah ditahun 2010 harus tutup sementara atas perintah pusat karena frekuensi Radio Republik Indonesia mengganggu radar kontrol penerbangan Singapura. Sebab sampai dengan sekarang sebagian wilayah Provinsi Kepulauan Riau masih belum jelas titik perbatasannya. Pesawat-pesawat yang hendak mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, atau Bandara Hang Nadim Batam atau juga di Palmatak, Anambas, meski melakukan koordinasi dengan pusat kontrol udara di Singapura. Padahal ketiga wilayah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI (Nurmandi 2012: 39). Sehingga kalau 5 kwatt saja sudah mengganggu frekuensi apalagi harus ditambah menjadi 10 sampai 20 kwatt. Yang akhirnya kita hanya bisa berdiam diri mendengarkan siaran-siaran asing tersebut sampai kedaulatan udara yang kita miliki berada di tangan kita.

Apabila semua permasalahan diatas dapat segera diselesaikan oleh pemerintah maka segala aspirasi masyarakat akan tersampaikan dan informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat juga akan dapat dinikmati diseluruh pelosok. Adapun selain memiliki peran sebagai sabuk pengaman informasi, RRI juga berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari *rating* yang selalu tinggi pada program-program yang disajikan RRI khususnya RRI Kota Tanjungpinang yang wilayah pancarannya meliputi Tanjungpinang, Bintan dan Kabupaten Lingga seperti Program Opini Publik yang selalu hadir dari jam 07.30 pagi sampai dengan jam 08.00 dimana masyarakat sangat antusias menyampaikan aspirasinya.

Ini adalah merupakan suatu hal yang wajar apabila kita melihat dari kondisi media yang ada di Kepulauan Riau ini dimana hanya Radio Republik Indonesia saja yang penulis nilai paling efektif yang bisa menyampaikan informasi kepada publik dan juga publik bisa berinteraksi langsung didalamnya. Menurut Katmini (kepala bagian penyiaran RRI Tanjungpinang, untuk RRI Tanjungpinang tidak hanya Program Opini Publik saja yang selalu ditunggu oleh masyarakat. Namun Program Walikota Menyapa disetiap minggu ke-2 dan ke empat tiap bulannya masyarakat bisa berdialog langsung dengan pak walikota juga selalu ditunggu oleh masyarakat. Dengan adanya program-program tersebut sangat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang responsif dan cepat

tanggap akan segala keluhan masyarakat.

Namun ini menjadi suatu fenomena Karena masyarakat seperti menemukan alternatif untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka dengan cepat. Padahal masyarakat mempunyai wakilnya yang duduk di DPRD yang seharusnya harus lebih cepat tanggap akan keluhan masyarakat. Namun faktanya untuk masyarakat dapat menyampaikan keluhannya harus mengikuti prosedur yang cukup panjang.

Adapun proses penyampaian aspirasi melalui DPRD ada 2 yaitu lisan (dialog) dan tertulis (resmi). Nah, untuk penyampaian aspirasi melalui lisan dapat masyarakat sampaikan kepada wakilnya melalui resees yaitu setiap 1 tahun hanya 2 x saja. Sedangkan untuk yang tertulis maka prosedurnya adalah pertama, surat tertulis yang ditujukan ke ketua DPRD, selanjutnya aspirasi akan disampaikan kepada masing-masing komisi sesuai dengan bidang yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Selanjutnya aspirasi akan diverifikasi serta dijadwalkan pengecekan dilapangan dimana anggota dewan akan turun kelapangan untuk *crosscheck* baru setelah itu ditindaklanjuti. Sebelumnya masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang berkaitan dengan aspirasi yang akan disampaikan (Tanjungpinang Pos, 5 Desember 2014).

Melihat kedua proses penyampaian aspirasi tersebut tentu masyarakat lebih memilih RRI dari pada

menyampaikan langsung karena selain cepat juga masyarakat bisa langsung berdialog dengan pejabat pembuat kebijakan. Seharusnya terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota tersebut juga diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya dan DPRD itu sendiri. Sehingga akan tercipta pemerintahan yang responsif dan transparan.

Simpulan

Radio Republik Indonesia adalah merupakan radio resmi milik pemerintah yang sudah lama berdiri dan sudah begitu besar berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Namun yang amat disayangkan RRI semakin tua usianya semakin harus bekerja keras untuk tetap bisa eksis bersaing dengan radio-radio milik swasta terlebih lagi di kota-kota besar yang segala sarana infrastruktur dan SDM-nya memadai. Mengenai peran RRI sebagai penyambung aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- RRI sudah sangat berperan aktif sebagai penyampai informasi sekaligus sebagai penyambung aspirasi masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya *rating* beberapa program RRI seperti Opini Publik, Dialog Interaktif, dan Walikota Menyapa. Adapun tingginya *rating* tersebut selain karena program yang dikemas oleh RRI sangat menarik minat masyarakat hal ini juga

dipengaruhi hal lainnya yaitu hanya RRI yang bisa dijangkau oleh masyarakat di daerah perbatasan dibandingkan dengan media lainnya seperti koran, tv dan internet akibat minimnya infrastruktur.

- Minimnya perhatian pemerintah terhadap RRI terutama untuk RRI yang dekat dengan perbatasan. Padahal yang dihadapi oleh RRI Yang ada diperbatasan adalah radio asing yang tentunya memiliki teknologi yang canggih dan memiliki daya pancar yang luas.
- Masih dikuasainya wilayah kedaulatan udara Indonesia oleh Singapura khususnya wilayah Kepulauan Riau sehingga membuat RRI tidak bisa bebas untuk bersiaran karena akan dapat mengganggu frekuensi radar untuk mengontrol lalu lintas penerbangan.

Adapun Saran dari penulis adalah:

1. Peran RRI di perbatasan ini sebaiknya tidak hanya meliputi unsur dari pemerintah tetapi juga sebaiknya diikuti oleh DPRD yang merupakan wakil rakyat, karena masyarakat belum merasa puas apabila hanya menyampaikan aspirasinya melalui reses yang cuma 2 kali dalam setahun.
2. Pemerintah pusat seharusnya lebih memperhatikan kondisi RRI dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah di daerah perbatasan khususnya Kepulauan Riau dengan membenahi infrastruktur seperti tower dan pemancar dari RRI tersebut, meningkatkan kualitas

sumber daya manusia RRI, menyediakan lahan untuk berdirinya stasiun-stasiun RRI tersebut.

3. Pemerintah pusat harus mengambil alih kedaulatan udara Republik Indonesia yang selama ini di kuasai oleh Pemerintah Singapura.

Daftar Pustaka

Agusta, Ivanovich. 2014. *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Eddyono, Aryo Subarkah. 2012. Radio Komunitas dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony: Studi Kasus Pada Radio Panagati dan Angkringan di Yogyakarta. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 2(1), 13-29

Nurmandi, Achmad et.al. 2012. *Menjaga Indonesia dari Kepri (Peluang, Tantangan dan 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Partogi Nainggolan, Poltak. 2015. *Keamanan Anambas sebagai "centre of SEA region"*. Jurnal CSIS.,44.,(1).

Peraturan Pemerintah no.12 Tahun 2005 Tentang Lembaga penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pusat Data dan Informasi RRI
(www.rri.co.id)

Said, M.Mas'ud. 2011. *Nasionalisme dan Ideologi Kebangsaan di Daerah Perbatasan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan., edisi 35.

"Surat Pembaca" Tanjungpinang, 5 Desember 2014

Tirtosudarmo, Riwanto. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia (Sebuah Tantangan)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

www. Dprd-Kepriprov.go.id